

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi. 2017.*Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Halim Barkatullah dkk. 2019.*Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Bandung: Nusamedia.
- Adrian Sutedi. 2011.*Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agussalim Andi Gadjong. 2007.*Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Amrah Muslimin. 2000.*Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Gatot Supramono. 2012.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Abrar Saleng. 2004.*Hukum Pertambangan*. Yogyakarta; UII Press.
- Jimlly Ashiddiqie. 2007.*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida. 2007.*Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mohammad Taufik Makarao et.al. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Mahfud MD. 2010.*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta:Renaka Cipta.
- Muladi. 1995.*Kapita Selekt system Peradilan Pidana*. Semarang:B.P Undip.

- Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- NHT Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pegadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Keala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudono Syueb. 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

B. Jurnal

- Afif Syarief, “Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, LPPM Universitas Jambi, 2019.
- Dedis Elvalina, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

- Fitria, “Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora p-ISSN: 2580-1244 Volume 2 Nomor 2 Desember 2018 e-ISSN: 2580-2305*.
- Hartati, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal MMH* Jilid 41 Nomor 4 Oktober 2012, LPPM Universitas Jambi, 2012.
- Hasan Basri, “Kewenangan Kepala Daerah dalam Menentukan Formasi Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Sistem Kepegawaian Di Indonesia”. *Jurnal Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechstvinding* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2015.
- Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, “Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*.
- RA. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019.
- Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huaniora P-ISSN: 2580-1244* Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

C. Kamus

- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.

D. Artikel Internet

- Akil Mochtar, *Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Era Otonomi*, www.google.com, diakses tanggal 28 Juli 2021.

Bambang P. Jatmiko, "Ini Poin-poin Penting dalam UU Minerba yang Baru Disahkan", diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>, tanggal akses 25 Juli 2021.

Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, <http://restuningmaharani.com/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acb3de67a7d8/kalangan-parlemen-kritik-perpres-kemudahan-masuknya-tka>, tanggal akses 07 Mei 2018.

Helzanova, *Hubungan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota*, Annury Futary.com, 5 Januari 2009, diakses tanggal 28 Juli 2021.

Mathias, *Teori pengelolaan*, digilib.unila.ac.id/930/9/BAB%20II.pdf teori pengelolaan, tanggal akses 23 Januari 2021.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, *Sejarah Pengaturan Pertambangan Minerba dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*, diakses melalui <https://pushep.or.id/category/publikasi>, tanggal akses 12 Februari 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

-----*Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

-----*Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 22 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

-----*Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 32 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

-----*Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

-----*Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.* UU Nomor 3 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525

-----*Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.* UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

-----*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.* PP Nomor 23 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142.

-----*Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Sumur Tua.* PERMEN ESDM Nomor 01 Tahun 2008.